1. Nama Unit Organisasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Fungsi :
   a. penyusunan program kerja di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   b. perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   c. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   e. penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas ;
   g. pemberian rekomendasi perijinan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	Primer
2.	Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)	Primer

3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Primer
4.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Primer
5.	Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)	Primer
6.	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)	Primer
7.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)	Primer
8.	Rasio UMK terhadap KHL (%)	Primer
9.	Jumlah MOU antar daerah kerjasama transmigrasi	Primer
10.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	Primer
11.	Jumlah calon transmigran (KK)	Primer
12.	*Dependency Ratio* (%)	Sekunder
13.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) (SPM Sosial)	Primer
14.	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%) (SPM Sosial)	Primer
15.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) (SPM Sosial)	Primer

16.	Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) (SPM Sosial)	Primer
17.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) (SPM Sosial)	Primer
18.	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%) (SPM Sosial)	Primer
19.	Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%) (SPM Sosial)	Primer
20.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer
21.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer
22.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer
23.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer
24.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer
25.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer

26.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer
27.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%) (SPM Ketenagakerjaan)	Primer